BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Desember 2018 pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat. Rata-rata besaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah untuk permodalan sektor pertanian di Indonesia periode Oktober 2014 sampai Desember 2018 adalah 6.658 miliar rupiah. Pembiayaan terbesar terjadi pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar 8.920 miliar rupiah. Sedangkan tingkat pembiayaan terendah berlangsung pada bulan Oktober 2014 dengan besaran yaitu 4.152 miliar rupiah.
2. Dalam jangka pendek NPF sektor pertanian berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pembiayaan BUS sektor pertanian. Sedangkan dalam jangka panjang, NPF sektor pertanian berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan BUS sektor pertanian. Hal ini menandakan ketika NPF sektor pertanian mengalami kenaikan maka berdampak pada turunnya pembiayaan BUS sektor pertanian. Hasil IRF Pembiayaan BUS Sektor Pertanian akibat guncangan pada variabel NPF mengalami penurunan pada periode ke empat meskipun masih dalam zona positif, perlu waktu tujuh bulan agar pembiayaan BUS sektor pertanian pulih dari guncangan NPF sektor pertanian. Kemudian hasil FEVD pembiayaan BUS sektor pertanian menunjukkan bahwa NPF sektor pertanian berpengaruh sebesar 3,24% pada akhir periode.
3. Dalam jangka pendek DPK berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pembiayaan BUS sektor pertanian. Sedangkan dalam jangka panjang, DPK berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan BUS sektor pertanian. Hal ini menandakan ketika DPK mengalami kenaikan maka berdampak pada turunnya pembiayaan BUS pada sektor pertanian. Meskipun secara nominal pembiayaan BUS sektor pertanian mengalami peningkatan

namun secara proporsi pembiayaan BUS sektor pertanian mengalami penurunan dibandingkan sektor lainnya. Hasil IRF Pembiayaan BUS sektor pertanian akibat guncangan pada variabel DPK direspon positif namun berada dalam zona negatif hingga akhir periode, perlu waktu tujuh bulan agar pembiayaan BUS sektor pertanian pulih dari guncangan DPK. Hasil FEVD pembiayaan BUS sektor pertanian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh sebesar 1,60% pada akhir periode.

4. Dalam jangka pendek dan jangka panjang nilai tukar rupiah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pembiayaan BUS sektor pertanian. Hal ini menandakan ketika nilai tukar rupiah mengalami kenaikan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek maka tidak berdampak signifikan pada naik-turunnya pembiayaan BUS pada sektor pertanian. Hasil IRF Pembiayaan BUS sektor pertanian akibat guncangan pada variabel nilai tukar rupiah mengalami respon yang fluktuasi, dan berada dalam zona negatif, dalam waktu 10 bulan pembiayaan BUS sektor pertanian belum bisa pulih dari guncangan nilai tukar rupiah. Hasil FEVD pembiayaan BUS sektor pertanian pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh sebesar 0,59% pada akhir periode.
5. Dalam jangka pendek dan jangka panjang imbal hasil SBIS berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan BUS sektor pertanian. Hal ini menandakan ketika imbal hasil SBIS mengalami kenaikan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek maka berdampak pada turunnya pembiayaan BUS pada sektor pertanian. Sementara itu dari hasil IRF Pembiayaan BUS Sektor Pertanian akibat guncangan pada variabel imbal hasil SBIS direspon positif dari periode delapan hingga akhir periode namun masih berada dalam zona negatif, perlu waktu delapan bulan agar pembiayaan BUS sektor pertanian pulih dari guncangan imbal hasil SBIS. Hasil FEVD pembiayaan BUS sektor pertanian pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa DPK berpengaruh sebesar 10,95% pada akhir periode.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi hasil penelitian ini adalah sebagian besar variabel belum berpengaruh secara signifikan dalam jangka pendek, begitu pula dengan nilai *R-Square* yang masih kecil dan tidak signifikan. sehingga, hasil *R-square* menyimpulkan bahwa sebagian besar pengaruh pembiayaan BUS pada sektor pertanian Bulan Oktober 2014 sampai Desember 2018 dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang penulis tawarkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti lebih banyak variabel baik itu yang mencerminkan kinerja perbankan syariah, makro ekonomi, maupun kebijakan moneter syariah agar mendapatkan hasil model yang baik dengan nilai *R-squred* yang signifikan. selain itu dapat pula dilakukan perbandingan antara pembiayaan perbankan syariah dan kredit perbankan konvensional dalam sektor pertanian.
2. Bagi pemerintah, dengan fakta imbal hasil SBIS masih mengacu pada suku bunga SBI (1 bulan) diharapkan melalui otoritas moneter, pemerintah mampu menciptakan instrumen moneter syariah yang mengacu pada prinsip syariah, namun tetap memiliki nilai kompetitif dengan instrumen moneter konvensional. Selain itu, pemerintah diharapkan terus mendukung perkembangan bank syariah yang sangat *concern* pada sektor riil. Selain itu. pemerintah disarankan memperbesar anggaran subsidi bagi sektor pertanian, baik itu dikelola langsung oleh pemerintah atau dikelola oleh lembaga keuangan untuk disalurkan ke sektor pertanian serta memperluas marketing hasil pertanian dan pengembangan ilmu dalam bertani agar lebih efektif dan efisien.
3. Bagi instansi keuangan syariah, diharapkan mampu meningkatkan proporsi pembiayaan pertanian seiring dengan peningkatan jumlah DPK yang berhasil dihimpun, karena pada jangka panjang peningkatan penyaluran pembiayaan sektor pertanian akan menurunkan NPF. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, perbankan syariah sebaiknya mampu meningkatkan sistem *monitoring* yang dimilikinya, sehingga dengan

meningkatnya kualitas sistem tersebut diharapkan jumlah pembiayaan bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, Bank umum syariah disarankan membentuk dana cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), PPAP yang harus dibentuk minimal mampu mengatasi fluktuasi rata-rata NPF selama tujuh bulan. PPAP yang paling baik adalah dana yang mampu mengatasi fluktuasi NPF selama empat belas bulan, sehingga dapat mengakomodir NPF jika terjadi guncangan pada pembiayaan dunia usaha.